

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara, yang biasanya diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita. Meningkatkan produktivitas adalah salah satu tujuan pembangunan ekonomi. Ekonomi Indonesia terus berkembang di kabupaten dan kota. Ini terkait dengan kebijakan otonomi daerah yang diberikan kepada daerah. Salah satu alternatif untuk mendorong dan mendorong pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat adalah pusat pertumbuhan ekonomi. Tingkat output biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ini termasuk tingkat teknologi, situasi pasar, sistem ekonomi (kerangka kehidupan ekonomi), jumlah sumber daya alam dan manusia yang tersedia atau digunakan, dan pandangan tentang output itu sendiri.

Pembangunan nasional adalah upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu SDM dan masyarakat berdasarkan kemampuan nasional, dengan menggunakan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta mempertimbangkan rintangan saat ini. Oleh karena itu, pembangunan nasional adalah usaha untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial, yakni aktifitas yang dilaksanakan sebuah negara untuk meningkatkan aktifitas ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya.

Untuk mewujudkan pertumbuhan angkatan kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kesempatan kerja, cukupnya lapangan kerja

yang tersedia merupakan tujuan penting dari pembangunan ekonomi. SDM selalu menjadi salah satu pelaku pembangunan dalam pembangunan ekonomi dan bidang lainnya. Mendorong dan mendaya gunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, kepastian ketersediaan kesempatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional, dan melindungi tenaga kerja agar tercipta dan kesejahteraan tenaga kerja beserta keluarga meningkat merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan.

Banyaknya jumlah penduduk tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan, bahkan bisa jadi beban bagi keberlangsungannya. Karena populasi yang terlalu besar dan tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sebagian besar orang yang berusia kerja tidak akan memiliki kesempatan kerja. Problem ketenagakerjaan hampir selalu dikaitkan dengan masalah kependudukan. Pada umumnya, masalah penduduk muda dengan tingginya laju pertumbuhan akan mengalami masalah ketenagakerjaan, terutama menyiapkan pekerjaan baru untuk angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan. Selain itu, ada permasalahan rendahnya mutu tenaga kerja disebabkan oleh pendidikan yang rendah, kesehatan masyarakat yang buruk, dan budaya dan etos kerja yang sering mengakibatkan ketidakmampuan tenaga kerja dalam bersaing.

Pekerjaan sangat penting untuk kehidupan manusia karena mencakup aspek sosial dan ekonomi. Salah satu komponen produksi, tenaga kerja merupakan hal paling penting dan paling berpengaruh dalam pengelolaan dan pengendalian sistem ekonomi, yang mencakup produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi. Mereka mengharapkan pendapatan yang memadai, kenyamanan beserta keamanan

tempat kerja, dan keuntungan lain karena mereka terlibat dalam proses produksi. Akibatnya, peran manusia dalam mengelola pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan. Di mana manusia adalah tenaga kerja, komponen pembangunan, dan konsumennya sendiri.

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah atau banyaknya orang yang bekerja di berbagai industri. Seiring perkembangan demografi, jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus berubah. Salah satu cara untuk mengukur potensi sektor perekonomian dalam penyerapan tenaga kerja adalah dengan melihat potensi pekerja berdasarkan lapangan pekerjaan. Hal tersebut menunjukkan struktur ekonomi suatu negara.

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tertentu dari tenaga kerja yang dimanfaatkan pada sebuah unit usaha tertentu ataupun merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sebuah unit usaha (Handoko, 2015). Adanya permintaan tenaga kerja menyebabkan adanya penyerapan tenaga kerja. Oleh sebab itu, penyerapan tenaga kerja merupakan permintaan tenaga kerja.

Kuncoro (2002) mengatakan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang sudah terisi oleh banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor ekonomi. Dalam dunia bisnis tidak memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, oleh sebab itu pemerintahlah yang mampu menyelesaikan dan mempengaruhi faktor eksternal.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia sehingga menyebabkan permasalahan tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan permasalahan terbesar buat sebuah negara dari tahun

ke tahun karea berhubungan dengan pengangguran, yang mana pengangguran yang tinggi menyebabkan penurunan produktivitas dan penghasilan penduduk yang akan menyebabkan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya. Disebabkan penduduk juga sebagai tenaga kerja mengakibatkan sulitnya dalam menyediakan lapangan kerja, yang mana jumlah penduduk yang banyak tanpa diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia akan mengakibatkan sebagian dari angkatan kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Sama halnya dengan Indonesia, ketenagakerjaan di Provinsi Jambi juga menjadi permasalahan terbesar di Provinsi Jambi.

Tabel 1.1. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi Tahun 2019-2024

Tahun	Angkatan kerja	
	Bekerja	Pengangguran
2020	1.739.003	93.990
2021	1.746.840	93.754
2022	1.797.819	86.459
2023	1.802.264	85.576
2024	1.833.267	86.075

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Tabel 1.1 menyajikan jumlah angkatan kerja yang bekerja di Provinsi Jambi. Pada tahun 2020 sebesar 1.739.003 orang, tahun 2021 jumlah penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 1.746.840 orang atau meningkat sebesar 0,45% kemudian diikuti tahun berikutnya tahun 2022 sebesar 1.797.819 orang atau meningkat sebesar 2,92%, begitu juga pada tahun 2023 meningkat sebesar 4.445 orang atau meningkat sebesar 0,25% dan tahun 2024 meningkat sebesar 1,72%. Sementara itu, angka pengangguran di Provinsi Jambi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini tidak sejalan dengan angka jumlah

penduduk yang bekerja yang justru mengalami peningkatan, semestinya angka pengangguran menurun. Hal ini mencerminkan bahwa jumlah orang bekerja senantiasa bertambah dari tahun ke tahun seiring dengan penambahan angkatan kerja dan angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja akan menjadi penyumbang pada peningkatan angka pengangguran di Provinsi Jambi.

Pemerintah daerah Provinsi Jambi harus dapat menyediakan dan menciptakan lapangan kerja agar angkatan kerja baru mampu diserap semaksimal mungkin sehingga dapat menurunkan angka pengangguran. Oleh sebab itu, kesempatan kerja sebagai salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan ekonomi. Akan tetapi, pembangunan yang sudah dilakukan di Provinsi Jambi tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dikarenakan pertumbuhan kesempatan kerja lebih rendah dibandingkan dari pertumbuhan angkatan kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Jambi makin memburuk saat pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Dampak dari kejadian tersebut terhambatnya kegiatan ekonomi dan banyaknya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dampak dari COVID-19 tersebut menambah angka pengangguran secara keseluruhan.

Secara makro, ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesempatan kerja pada suatu perekonomian, diantaranya yaitu investasi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes. Menurut Keynes investasi memiliki korelasi positif dengan kesempatan kerja. Menurut Keynes investasi mampu menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak (Mita et al., 2023). Hal tersebut

mencerminkan bahwa investasi yang besar akan diikuti oleh peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisa (2017), Meilasari (2020), Anggraini dan Muchtolifah (2023), dan Wahyuni et al., (2024) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Banurea (2022), Anggraini et al., (2020), dan Iksan dan Suliswanto (2020) yang membuktikan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada tabel berikut akan disajikan jumlah investasi di Provinsi Jambi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1.2. Investasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Investasi (Rp Juta)	%
2020	3.900.007,8	-
2021	6.946.719,9	78,12
2022	9.441.253,0	35,91
2023	9.606.526,5	1,75
2024	11.570.720,0	20,45

Sumber: DPM-PTSP Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa investasi Jambi pada tahun 2020 sebesar Rp 3.900.007,8 juta, kemudian pada tahun 2021 investasi di provinsi Jambi sebesar Rp 6.946.719,9 atau naik sebesar 78,12% kemudian pada tahun berikutnya pada tahun 2022 investasi Jambi sebesar Rp 9.441.253,0 juta atau naik sebesar 35,91% dari tahun sebelumnya, begitu juga pada tahun 2023 sebesar Rp 9.606.526,5 atau naik sebesar 1,75% dan pada tahun 2024 meningkat lagi sebesar 20,45%.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah upah minimum. Pemerintah harus mengatasi masalah ketenagakerjaan dengan

menerapkan kebijakan upah minimum untuk meningkatkan tingkat upah yang diterima masyarakat. Upah perkapita pekerja ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat upah rata-rata tenaga kerja (Iksan, Arifin and Suliswanto, 2020). Karena peningkatan upah ditandai dengan peningkatan permintaan barang dan jasa, produksi dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan (Iksan, Arifin and Suliswanto, 2020). Karena kenaikan upah diharapkan meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan konsumsi, kenaikan upah juga dapat berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja (Iksan, Arifin and Suliswanto, 2020). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangesti dan Prawoto (2018), Meilasari (2020), dan Ulfa et al., (2022) yang menyatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisa (2017), Ramdani dan Kadarwati (2021), Iksan dan Suliswanto (2020), dan Warapsari dan Boedirochminarni (2020) yang membuktikan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1.3. Upah Minimum Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	UMP (Rp)	%
2020	2.630.162	-
2021	2.630.162	-
2022	2.698.940	2,61
2023	2.943.033	9,04
2024	3.037.122	3,20

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 1.3 menyajikan UMP Jambi pada tahun 2020 sebesar 2.630.162, kemudian pada tahun 2021 UMP Jambi sama dengan tahun

sebelumnya yaitu Rp 2.630.162 kemudian pada tahun berikutnya pada tahun 2022 UMP Jambi sebesar Rp 2.698.940 atau naik sebesar 2,61% dari tahun sebelumnya, begitu juga pada tahun 2023 sebesar Rp 2.943.033 atau naik sebesar 9,04% dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 3,20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Faktor berikutnya yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah inflasi. Inflasi adalah komponen tambahan yang mempengaruhi ketenagakerjaan. Menurut Sukirno inflasi mempengaruhi kestabilan ekonomi suatu negara. Inflasi berarti harga barang naik secara keseluruhan (Nofrita and Marwan, 2022). Kurva Philips menunjukkan hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran. Inflasi memiliki korelasi yang negatif dengan tingkat pengangguran. Kurva philips mencerminkan terdapatnya trade-off jangka pendek antara inflasi dan tingkat pengangguran rendah cenderung mempunyai inflasi yang tinggi, sedangkan tahun-tahun dengan pengangguran tinggi cenderung mempunyai inflasi rendah (Mankiw, 2013). Teori ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramdani dan Kadarwati (2021), Warapsari dan Boedirochminarni (2020), Anggraini dan Muchtolifah (2023), Hasmawati dan Rahman (2021), dan Nofrita dan Marwan (2022) yang membuktikan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada tabel berikut ini akan disajikan tingkat inflasi di Provinsi Jambi selama periode 2020-2024.

Tabel 1.4. Inflasi di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Inflasi (%)
2020	3,01
2021	1,66
2022	6,35
2023	3,22
2024	1,43

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 1.4 diketahui bahwa tingkat inflasi Jambi pada tahun 2020 sebesar 3,01%. Kemudian pada tahun 2021 tingkat inflasi Jambi turun dari tahun sebelumnya menjadi 1,66% kemudian pada tahun berikutnya pada tahun 2022 tingkat inflasi Jambi sebesar 6,35%, dan pada tahun 2023 sebesar 3,22% sedangkan tahun 2024 tingkat inflasi turun menjadi 1,43%. Tingkat inflasi Jambi selama periode 2020 - 2024 berfluktuatif.

Selain faktor investasi, upah minimum, dan inflasi faktor yang juga berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan dalam meningkatkan jumlah kesempatan kerja yang tersedia. Keynes mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengurangi pengangguran adalah dengan meningkatkan produksi, yang secara tidak langsung meningkatkan kapasitas produksi, yang pada gilirannya akan berdampak pada penambahan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan (Iksan, Arifin and Suliswanto, 2020). Pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang positif dengan penyerapan tenaga kerja, artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Idham dan Satrianto (2018), dan Anggraini dan Safri (2020) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Sedangkan hasil penelitian Yacoub dan Firdayanti (2019), Anggraini dan Muchtolifah (2023), dan Hasmawati dan Rahman (2021) bertolak belakang dengan teori, hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tabel 1.5. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Pertumbuhan ekonomi (%)
2020	-0,51
2021	3,69
2022	5,13
2023	4,66
2024	4,51

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Berdasarkan Tabel 1.5 diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Jambi pada tahun 2020 sebesar minus 0,51%. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Jambi meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 3,69% kemudian pada tahun berikutnya pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Jambi sebesar 5,13%, dan pada tahun 2023 sebesar 4,66% dan tahun 2024 turun dari tahun sebelumnya menjadi 4,51%. Pertumbuhan ekonomi Jambi selama periode 2020-2024 berfluktuatif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi selama periode 2020-2024 adalah sebesar 3,50%.

Berdasarkan penjelasan di atas dan adanya gap research dari beberapa hasil penelitian terdahulu merupakan alasan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyerapan tenaga kerja. maka penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Investasi,**

Upah Minimum Provinsi, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2024”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga kerja di Provinsi Jambi selama periode 2010-2024 berfluktuatif, pada tahun 2021 meningkat sebesar 0,45% lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020, tahun 2021 perkembangannya meningkat menjadi 2,92% dan tahun 2023 perkembangan jumlah tenaga kerja kembali mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi sebesar 0,25%. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat sebesar 1,72%.
2. Investasi di Provinsi Jambi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif, pada tahun 2021 meningkat tinggi yaitu sebesar 78,12%, sedangkan tahun 2022 pertumbuhan invetasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 35,01% dan tahun 2023 kembali mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 1,75% dan pada tahun 2024 meningkat sebesar 20,45%
3. Jumlah UMP di Provinsi Jambi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif, pada tahun 2021 tidak terjadi perubahan, sedangkan tahun 2022 hanya mengalami peningkatan sebesar 2,61% sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 9,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan tahun 2024 meningkat sebesar 3,20%.

4. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024 berfluktuatif, pada tahun 2020 perekonomian Provinsi Jambi mengalami depresi yaitu sebesar 0,51%, tahun 2021 perekonomian kembali membaik dengan laju pertumbuhan sebesar 3,69%, begitu juga dengan tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 5,13% sedangkan pada tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 4,66%. Sedangkan pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 4,51%.

1.3. Rumusan Masalah

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan investasi, upah minimum, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010 - 2024?
2. Bagaimanakah pengaruh investasi, upah minimum, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010 - 2024?

1.4. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan investasi, upah minimum, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010 - 2024

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi, upah minimum, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi tahun 2010 - 2024

1.5. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat akademis dan praktis yang diharapkan dari temuan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Secara akademis

Diharapkan akan membantu penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan pengaruh upah minimum, investasi, inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

2. Secara praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai sumber data dan informasi bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan yang berhubungan dengan dampak investasi, UMP, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.